

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI
KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan Diajukan oleh

NUR WAHIDAH

E051181010



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DESA DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN
LUWU TIMUR

Di susun dan diajukan oleh

NUR WAHIDAH

E051181010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing II



Dr. A. Lukman Iwan, S.IP, M.Si
NP.19790106 200501 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DESA DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**NUR WAHIDAH
E051181010**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

MAKASSAR, 2022

PANITIA UJIAN


Ketua : Dr. A. M. Rusli, M.Si

()

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

()

Anggota : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.si

()

Anggota : Dr. Suhardiman S.ip, M.si

()

Pembimbing Utama : Dr. A. M. Rusli, M.Si

()

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Wahidah
NIM : E051181010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Di kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliah Wabarakaatu, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Perpustakaan desa Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhinga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, yakni ibunda

Sulastrri dengan ayahanda Sukiman yang telah mendidik, memberikan semangat, doa dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Tak lupa pula kepada Adikku Nur riadin, serta Keluarga besarku terima kasih atas semua doa, dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan kepada Penulis, mari menggapai cita bersama.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni :
 - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten luwu timur,
 - Pustakawan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur,
 - Pemerintah Desa Bangun jaya dan staf perpustakaan desa bangun jaya,
 - Pemerintah Desa mulyasri dan staf perpustakaan desa mulyasri,
 - Pemerintah Desa Bangun karya dan staf perpustakaan desa bangun karya,
 - Masyarakat Desa bangun jaya, desa mulyasri dan desa bangun karya. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan

atas bantuan dan kerja samanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih untuk sepupu penulis Anggi saputri yang ikut serta membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukannya.
10. Terima kasih untuk sahabat Ainun dan Femi yang semasa perkuliahan penuh canda dan tawa, suka dan duka bersama, terima kasih atas support nya selama ini.
11. Terima kasih untuk sahabat sejak sekolah menengah atas ratih, lisma, sri, isma, masni dan nanda yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan Dini, Ica, Amel, Muti, Yudi, Nuna, Sila, Wihdah, Fani Kiki, Nunu, Nur, Nidu, Erika, Nini, Sili, mita, syifa serta teman-teman angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Terima kasih kepada saudara(i) KKN Gelombang 106 terkhusus untuk Posko Desa 5 Kecamatan Tomoni Kabupaten luwu timur fertis, desi, afni, wayan dan yudi yang telah memberi motivasi, semangat, dan mengajarkan arti kebersamaan dalam waktu yang singkat.

14. Terima kasih kepada murni liling dan fertis Hoby wiani yang ikut serta membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukannya.
15. Terakhir, Teruntuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini. Terima kasih telah kuat bertahan dengan kerasnya kehidupan. Terima kasih telah menjadi pribadi yang terus berusaha lebih baik. Maaf jika ego masih mengecewakan. Cara terbaik untuk menghargai hidup adalah dengan berterima kasih. Semoga selalu dalam kebahagiaan.

Adanya partisipasi yang telah diberikan oleh pihak tersebut di atas, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT dapat membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyertai kita semua dan mencintai hamba-hamba-Nya yang cinta kepada ilmu sebagai media mendekatkan diri kepada-Nya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin!

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, 20 maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENERIMAAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan tentang analisis	10
2.2 Tinjauan Tentang Peran.....	11
2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan.....	14
2.3.1 Tinjauan Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	15
2.3.2 Tinjauan tentang pemerintah daerah	18
2.4 Tinjauan Tentang Dinas Perpustakaan Dan kearsipan kabupaten luwu timur	20
2.5 Tinjauan tentang perpustakaan desa.....	22
2.5.1 pentingnya perpustakaan.....	23
2.5.2 Fungsi perpustakaan desa.....	24
5.1 Pengembangan Perpustakaan Desa	28

5.1.1	Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	30
5.1.2	Pengembangan Koleksi	32
5.1.3	Pengembangan Tenaga Perpustakaan	34
5.1.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana	35
5.1.5	Pembudayaan Kegemaran Membaca	36
5.2	Kerangka konsep	38
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1	Lokasi penelitian.....	42
3.2	Tipe penelitian.....	42
3.3	Jenis dan Sumber data	43
3.4	Teknik pengumpulan data.....	43
3.5	Informan penelitian.....	45
3.6	Analisis data.....	46
3.7	Definisi operasional.....	47
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	50
4.1.1	Sejarah Kabupaten Luwu Timur	50
4.1.2	Letak Geografis Kabupaten luwu timur.....	51
4.1.3	Keadaan Topografis Kabupaten Luwu Timur	53
4.1.4	Visi Misi kabupaten luwu timur	55
4.2	Gambaran umum dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur	60
4.2.1	visi misi dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur.....	61
4.2.2	struktur organisasi.....	66
4.2.3	kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	69
4.3	Gambaran umum kecamatan tomoni	70
4.4	Gambaran umum Lokasi Penelitian	72
4.4.1	Desa bangun jaya	75
4.4.2	Desa mulyasri	77

4.4.3	Desa Bangun karya.....	78
4.5	Hasil penelitian peran pemerintah daerah dalam pengembang perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur.....	80
4.5.1	pengembangan perpustakaan desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.....	82
4.5.2	pengembangan koleksi.....	92
4.5.3	pengembangan tenaga perpustakaan	100
4.5.4	pengembangan sarana dan prasarana.....	107
4.5.5	pembudayaan kegemaran membaca.....	115
4.6	hasil penelitian faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur 123	
4.6.1	faktor pendukung.....	123
4.6.2	faktor penghambat	129
BAB V	137
KESIMPULAN DAN SARAN	137
5.1	KESIMPULAN.....	137
1.2	SARAN.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144

DAFTAR GAMBAR

Figure 1. kerangka konsep	41
Figure 2. peta Adminitrasi Kabupaten Luwu Timur.....	52
Figure 3 diagram presentase kemiringan di wilayah kabupaten luwu timur	54
Figure 4 : kegiatan bimtek penggunaan aplikasi inislite.....	84

DAFTAR TABEL

Table 1. Keadaan geografi	52
Table 2. tabel topografi kabupaten luwu timur.....	53
Table 3 kemiringan lereng di kabupaten luwu timur	54
Table 4 : Luas wilayah dan presentase menurut desa di kecamatan tomoni.....	73
Table 5 : jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk	74
Table 6 : tabel jumlah buku	96
Table 7 : informasi tentang pengelola perpustakaan desa.....	100
Table 8 : tabel jumlah sarana dan prasarana di perpustakaan desa bangun jaya	108
Table 9 : tabel jumlah sarana dan prasarana perpustakaan desa mulyasri	111
Table 10 : tabel jumlah sarana dan prasaran perpustakaan desa bangun karya	113

ABSTRAK

NUR WAHIDAH, Nomor Pokok E051181010 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan desa Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur (Dibimbing Oleh Dr. H. A. M. Rusli, S.IP, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Perpustakaan Desa dikecamatan Tomoni kabupaten luwu timur dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan perpustakaan desa dikecamatan tomoni kabupaten luwu timur sudah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah namun didalam pengembangan perpustakaan desa dikecamatan tomoni kabupaten luwu timur terdapat berbagai hambatan diantaranya tidak adanya dukungan dari pemerintah desa dalam pengembangan perpustakaan desa dan anggaran yang terbilang masih minim sehingga menghambat laju pengembangan perpustakaan desa dikecamatan tomoni kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci : Analisis, Peran Pemerintah Daerah, Dalam Pengembangan Perpustakaan desa

ABSTRACT

NUR WAHIDAH, Principal Number E051181010 Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiling Thesis with the Title: Analysis of the Role of Government of Natural District Development village Library In Tomoni District of East Luwu Regency (Guided by Dr. H. A.M. Rusli, S.ip, M.si and Dr. A. lukman Irwan, S.IP, M.Si).

This study aims to determine and analyze how the role of the local government in the development of village libraries in Tomoni sub-district, East Luwu district and what factors are the supporting and inhibiting factors. The type of research used is descriptive research type with qualitative techniques. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentasi. Data were collected from various sources to obtain sufficient data. The data obtained is then analyzed qualitatively through organizing the data, describing it into units, arranging it into a pattern, choosing which ones are important and what will be studied, describing them in the form of words and sentences, and then making conclusions.

The results of the study concluded that the development of the village library in the Tomoni sub-district of East Luwu district has been running according to local government planning but in the development of the village library in the Tomoni district of East Luwu district there are various obstacles including the absence of support from the village government in the development of the village library and the budget is still minimal. thus hampering the pace of development of the village library in the Tomoni sub-district, East Luwu district.

Key words : Analysis, Role of Local Government, In the Development of Village Libraries

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era globalisasi merupakan era dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dalam kehidupan manusia. Di era ini, terjadi banyak persaingan di berbagai bidang yang menuntut masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas dari sumber daya manusia yang unggul, mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mau bersaing di dalam dunia kerja yang semakin ketat. Namun, hal tersebut dapat diwujudkan melalui bagaimana kualitas pendidikan seseorang. Seseorang yang mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi akan mampu bersaing di dunia kerja.

Rendahnya minat membaca masyarakat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Bangsa yang maju dapat diukur dari bagaimana tingkat minat baca masyarakatnya dan seberapa aktif masyarakatnya membaca dalam setiap harinya. Data terbaru Januari 2020, UNESCO menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca masyarakat sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk *World's Most Literate Nations*

Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Botswana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa.

Perpustakaan desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan minat baca dan juga gerakan literasi di masyarakat. Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat menjadi representasi untuk mengukur bagaimana tingkat minat membaca masyarakat. Seberapa banyak perpustakaan yang tersedia di suatu negeri, bagaimana fasilitas yang disediakan, berapa banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan dan berapa banyak rata-rata buku yang di pinjam dalam setiap harinya.

Perpustakaan desa merupakan salah satu sarana yang paling dekat dengan masyarakat di pedesaan, keberadaan perpustakaan desa tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan kebudayaan manusia. Perpustakaan desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, perpustakaan desa merupakan sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestari kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perpustakaan dimana pemerintah berperan dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan perpustakaan guna mendukung dalam pengembangan perpustakaan agar dapat menarik minat membaca masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sehingga mampu bersaing di era globalisasi yang semakin ketat.

Dalam upaya mendukung pengembangan perpustakaan desa sebagai salah satu sarana yang mendukung pendidikan nasional yaitu dengan melaksanakan fungsinya. Pemerintah melalui kebijakannya yaitu undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa “perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. Selain itu, dijelaskan juga dalam keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 3 tahun 2001 tentang perpustakaan desa/kelurahan “perpustakaan desa/kelurahan

adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional”.

Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah pengembangan perpustakaan desa, pemerintah daerah kabupaten luwu timur membentuk struktur organisasi, yakni dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam pengembangan perpustakaan desa.

Dinas yang di bentuk oleh pemerintah daerah kabupaten luwu timur adalah dinas perpustakaan dan kersipan. Dinas perpustakaan dan kersipan kabupaten luwu timur dibawah oleh bidang perpustakaan, bidang kersipan, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional. Dinas perpustakaan dan kersipan adalah unsur pelaksana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebuah Kabupaten. Disamping itu dinas perpustakaan dan kersipan kabupaten luwu timur mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan perpustakaan dan kersipan daerah yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati luwu timur Nomor 48 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur terkait tugas pokok dari dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perpustakaan. Pembinaan yang dimaksud dalam hal ini tertuang dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan perpustakaan daerah bab VIII pasal 26 ayat 2 pembinaan yang dimaksud meliputi:

- a. Pengembangan perpustakaan desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- b. Pengembangan koleksi
- c. Pengembangan tenaga perpustakaan
- d. Pengembangan sarana dan prasarana; dan
- e. Pembudayaan gemar membaca

Pemerintah memiliki tiga fungsi yakni fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan Fungsi Pembangunan, masalah mengenai pengembangan perpustakaan desa masuk dalam kategori pelayanan. Pemerintah dalam hal ini dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur berperan dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan perpustakaan desa.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perpustakaan desa yang sesuai dengan arah pengembangan kebijakan tingkat nasional. Salah satu wujud dari keseriusan pemerintah daerah kabupaten luwu timur dalam pengembangan perpustakaan adalah dengan di keluarkannya peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan perpustakaan daerah.

Pada pra penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat beberapa perpustakaan desa di kecamatan tomoni masih belum terdapat beberapa hal yang menghambat jalannya pelayanan perpustakaan desa sehingga dapat menjadi penghambat dalam pengembangan perpustakaan desa. Misalnya perpustakaan desa bangun karya yang hanya mempunyai 1 orang staf, kemudian belum dilakukan penambahan koleksi buku, jumlah pengunjung perhari paling banyang adalah 2 orang. Perpustakaan lainnya adalah perpustakaan desa mulyasri, perpustakaan tersebut selalu melakukan penambahan koleksi akan tetapi masih sepi pengunjung hal ini dikarenakan perpustakaan tersebut hanya memiliki 1 staf perpustakaan saja hal tersebut menghambat jalannya pelayanan perpustakaan desa. Selain itu ada salah satu perpustakaan desa di kecamatan tomoni yakni perpustakaan desa bangun jaya perdasarkan pengamatan yang dilakukan berkembang

dengan sangat baik hal ini dapat dilihat melalui pencapaian perpustakaan nirwana berhasil meraih juara harapan I tingkat nasional.

Mengenai kurang berkembangnya perpustakaan desa maupun taman bacaan masyarakat yang ada di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur , disebabkan oleh banyak faktor seperti berkaitan dengan, petugas perpustakaan, Sarana dan prasarana, bahan bacaan, serta dukungan dari pemerintah desa.

Mengamati kondisi perpustakaan desa di kecamatan tomoni, Kabupaten luwu timur seperti yang jelaskan diatas, terdapat perpustakaan desa dikecamatan tomoni yang sudah berkembang dan ada yang belum berkembang merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan desa dan mengangkat judul penelitian yakni **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah pokok yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur dalam dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur ?

1.3 TUJUAN

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur dalam dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

adapun manfaat yang dihasilkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. manfaat teoritis, penelitian ini dapat menjadi alat dalam menganalisis suatu masalah sosial dalam bentuk pengetahuan dan juga sebagai bahan yang digunakan dalam menambah wawasan khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, rujukan dan bahan informasi bagi pemerintah kab/kota. Dalam hal ini masukan bagi pemerintah kabupaten luwu timur khususnya dalam pengembangan perpustakaan desa di kabupaten luwu timur.
3. Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno analisis yang artinya melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti melepas sehingga jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap kedalam bahasa Inggris menjadi analysis yang kemudian diserap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Kata analisis digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ilmu bahasa, ilmu sosial maupun ilmu alam. Secara umum pengertian analisis atau analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen penyusunannya untuk dikaji. Menurut Komaruddin (2011: 53) mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk mengurangi suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.

Menurut Dwi Prastowo Dorminto dan Rifka Julianty (2015: 53) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Sedangkan Harahap (2009: 189) pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit

menjadi berbagai unit yang terkecil. Menurut Sofyan Syafri (2009: 207) Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

2.2 Tinjauan Tentang Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peranan (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang

yang menjalankan peranan tersebut. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

1. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

2.3 Tinjauan Tentang Pemerintahan

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011: 2).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

2.3.1 Tinjauan Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut Kaufman (Thoha, 1995: 101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Sementara menurut Rasyid (2011: 13) bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu :

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non

pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

- 5) Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya : membantu orang tidak mampu dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7) menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan

(empowerment), dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (maintenance of peace and order), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik dan Keempat, perpajakan.

Sedangkan menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
- 2) Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak

mampu penuh sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

2.3.2 Tinjauan tentang pemerintah daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Pembentukan wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (Pemerintah) sampai ke daerah (Pemerintah Daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu

dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya.

Namun demikian walaupun bersifat utuh, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sebagaimana dimaksud itu yang masing-masing berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan hirarki antara satu sama lainnya dan bersifat otonom.

Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Berdasarkan asas tersebut kekuasaan negara akan terbagi antara Pemerintah di satu pihak dan Pemerintah Daerah di lain pihak. Adanya pembagian kekuasaan dalam rangka otonomi daerah pada masing-masing negara tidak sama, tergantung kepada sistem dan kehendak politik pemerintah dalam memberikan kekuasaan tersebut. Dalam tatanan negara kesatuan, maka akan terjadi dominasi atas daerah atau dominasi pemerintah atas masyarakat. Dengan bertambahnya kepentingan yang

harus diselenggarakan oleh Pemerintah, maka menurut Amrah Muslimin, pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas-asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.

2.4 Tinjauan Tentang Dinas Perpustakaan Dan kearsipan kabupaten luwu timur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”.

Peraturan Bupati luwu timur Nomor 27 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas

perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur (Berita daerah kabupaten luwu timur tahun 2016 nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati luwu timur nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati luwu timur nomor 27 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur berita daerah kabupaten luwu timur tahun 2018 nomor 36).

A. Kepala dinas

Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Tinjauan tentang perpustakaan desa

Secara bahasa Indonesia istilah perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti: (1) kitab, buku- buku, (2) kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan kata per dan akhiran kata an, menjadi perpustakaan. Di dalam bahasa Inggris disebut library (liber), bibliotheek (Belanda), bibliohek (Jerman), bibliotheque (Perancis), bibliotheca (Spanyol, Portugal), bible: biblia (Yunani).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka akan ditemui definisi Perpustakaan sebagai “Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka”.

Selanjutnya jika merujuk Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Perpustakaan Desa atau

Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan/mendukung kegiatan pendidikan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) nomor 005: 2011, bahwa: Perpustakaan desa atau kelurahan merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa atau kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender (Indonesia. Perpustakaan Nasional., 2011).

2.5.1 pentingnya perpustakaan

Pada dasarnya perpustakaan mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis di dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembentukan dan penyelenggaraan, perpustakaan desa sudah sangat mendesak. Namun, dalam praktiknya belum semua orang menyadari tentang hal tersebut karena keterbatasan dan pemahaman. Faktanya belum semua pemerintah desa menjabarkannya dalam kebijakan dan pelaksanaan untuk mewujudkan atau membangun perpustakaan.

Menurut Sutarno (2006, hal. 46), perpustakaan desa adalah sumber kekuatan, imajinasi, inspirasi untuk berpikir, belajar, bekerja, berkarya dan berprestasi. Sebuah kemajuan kehidupan akan akan diwarnai atau tergantung pada kemampuan atau pengembangan berpikir. Untuk menciptakan ide-ide dan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, bukan untuk merusak tatanan dan norma-norma yang sudah ada.

2.5.2 Fungsi perpustakaan desa

Perpustakaan Desa memiliki beberapa fungsi yang berperan untuk memajukan desa. Kehidupan masyarakat dapat dikembangkan mulai dikembangkannya perpustakaan desa, mulai dari membuat masyarakat suka membaca hingga dalam bidang pendidikan dan kebutuhan informasi serta pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat desa berpikiran terbuka dan memiliki pengetahuan seluas-luasnya. Secara umum perpustakaan desa mengemban fungsi yang sama dan berlaku juga pada jenis perpustakaan lainnya.

Menurut Darmono (2006) beberapa fungsi yang dianggap penting dari perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Informasi Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar pemakai dapat:

- 1) Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu
- 2) Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhannya
- 3) Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan
- 4) Memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.

2. Fungsi Pendidikan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh pemakai adalah:

- 1) Agar pemakai mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan
- 2) Untuk membangkitkan dan mengembangkan minat akademik pemakai yaitu mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual,

- 3) Mendorong kecepatan untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah kehidupan serta masalah-masalah lainnya yang dihadapi pemakai
- 4) Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis
- 5) Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru
- 6) Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis
- 7) Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru

3. Fungsi Kebudayaan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai untuk:

- 1) meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok
- 2) membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan, yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap citarasaseni
- 3) mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian,

- 4) mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis
- 5) menumbuhkan budaya baca di kalangan pemakai sebagai bekal penguasaan alih teknologi.

4. Fungsi Rekreasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya untuk:

- 1) menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani
- 2) mengembangkan minat rekreasi pemakai melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang
- 3) menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif

5. Fungsi Pelestarian

Fungsi pelestarian selain melestarikan dan merawat koleksi yang dimiliki perpustakaan, keberadaan perpustakaan desa diharapkan juga mempunyai fungsi dalam menjaga kearifan lokal yang di masyarakat. Hal ini tidaklah mudah. Karena tingkat baca masyarakat sendiri pada umumnya masih rendah. Namun tidak menutup kemungkinan fungsi pelestarian kearifan lokal ini dapat dilaksanakan oleh perpustakaan. Oleh sebab itu sedapat mungkin pengelolaan perpustakaan desa melibatkan semua komponen

masyarakat dalam arti tidak terjun langsung melakukan pengolahan tetapi memberikan sumbang saran danpemikiran. Yang dimaksud dengan fungsi melestarikan kearifan lokal adalah melestarikan dan memelihara nilai-nilai budaya adi luhung yang tumbuh di masyarakat. Di desa sangat mungkin masih ada kearifan lokal yang perlu dilestarikan, misalnya tanaman obat yang tidak ada di tempat lain, atau jenis tanaman tertentu yang tidak ada di tempat lain, atau keterampilan masyarakat dalam bidang tertentu yang menjadi keunikan dan kekhasan daerah itu.

5.1 Pengembangan Perpustakaan Desa

Pengembangan perpustakaan Desa merupakan satu rangkaian kegiatan dengan pembinaan. Jika pembinaan perpustakaan diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang berdaya guna yang semakin baik, maka pengembangan perpustakaan adalah upaya untuk meningkatkan segala suatu yang sudah dicapai. Maksudnya agar perpustakaan secara terencana dapat lebih berkembang dan maju. Upaya pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di Indonesia sudah dituangkan di dalam UU nomor 43 tahun 2007. Menurut Pasal 4 bab I, tujuan utama perpustakaan yaitu dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah daerah kabupaten luwu timur mempunyai peran penting dalam pengembangan perpustakaan desa, pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur. Peraturan Bupati luwu timur Nomor 48 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dari dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur diatas penulis mengambil salah satu tugas yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan. yakni pada bagian C yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan

kearsipan sebagai representatif dari ke 6 tugas pokok dinas perpustakaan dan kearsipan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berdasarkan peraturan bupati luwu timur nomor 8 tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan perpustakaan daerah pada bab VI pasal 12 ayat 2 yakni pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan akan sangat membantu tenaga perpustakaan menjalankan fungsinya. Teknologi akan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan teratur. Penggunaan teknologi dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan untuk mencapai automasi perpustakaan. Menurut Ridwan, automasi perpustakaan dapat diterapkan berbagai kegiatan perpustakaan, seperti aktifitas administrasi, prosedur perkantoran, dan penyampaian layanan pada pengguna.

Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan bukanlah hal yang baru. Berkembangnya teknologi dalam bidang informasi pada umumnya dengan sendirinya telah membantu pengembangan pengelolaan perpustakaan, seperti

pengolahan data dan layanan sirkulasi yang terkomputerisasi. Maka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang secara langsung mempengaruhi kinerja pengelolaan perpustakaan harus dilakukan. Dengan teknologi yang mutakhir, kinerja tenaga perpustakaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Selain itu, penerapan teknologi yang semakin baru dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya. Semakin cepat pekerjaan dilakukan, akan semakin banyak pula target pekerjaan yang tercapai, dan seakin banyak waktu untuk melayani pengguna. Dengan menggunakan sistem pengolahan dan pengelolaan perpustakaan yang terkomputerisasi, diharapkan pula agar perpustakaan dapat mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang paperless atau mengurangi penggunaan kertas. Mengurangi penggunaan kertas secara tidak langsung akan berpengaruh pada pengeluaran untuk kebutuhan kertas dan pada penggunaan ruang yang lebih baik dan suasana perpustakaan yang lebih rapi.

Perpustakaan sebagai lembaga publik pengelola dan penyedia layanan informasi merupakan salah satu pihak yang secara otomatis terkena dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai jenis perpustakaan beramai-ramai melakukan adaptasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan dan pustakawan mendefinisikan ulang konsep perpustakaan. Konsekuensi logis bagi pustakawan,

mereka harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam mengelola dan melayani informasi. Apabila ditelaah lebih lanjut, pustakawan sebenarnya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi informasi, di mana proses pekerjaan dan kegiatan pustakawan akan sangat terbantu dalam menavigasi penyediaan informasi. Teknologi informasi dapat membantu pustakawan merevolusi strategi penyimpanan dan pelayanan informasi (Raggett, 2006).

5.1.2 Pengembangan Koleksi

Menurut Michael R Gabriel (1995 : 3) pengembangan koleksi diartikan sebagai proses yang sistematis dalam membangun koleksi perpustakaan untuk melayani kegiatan penelitian, pengajaran, penelitian, rekreasi, serta untuk kebutuhan lain dari pengguna perpustakaan. Adapun proses ini meliputi pemilihan dan penyiangan pustaka, pengadaan serta evaluasi koleksi untuk memastikan seberapa baik mereka dapat melayani kebutuhan pengguna. Sedangkan Soeatminah (1992 : 66) mengartikan pengembangan koleksi merupakan salah satu kegiatan kerja perpustakaan yang bertugas menyediakan sumber informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada pemakai sesuai dengan kebutuhan dan minat pemakainya.

pengertian pengembangan koleksi (collection development) Edwards.G. Evans (1999 : 15) menyatakan pengembangan koleksi

adalah suatu proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koleksi sebuah perpustakaan dengan menghubungkan pada kebutuhan penggunanya serta berupaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Jadi pengembangan koleksi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan koleksi perpustakaan disamping sebagai upaya peningkatan mutu koleksi yang ada dalam rangka memenuhi tuntutan akan informasi-informasi terbaru yang dibutuhkan para pengguna. Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan Peggy Johnson (2009) yang menyebutkan bahwa pengembangan koleksi diartikan sebagai kegiatan di perpustakaan yang meliputi melakukan analisis kebutuhan pengguna, menyusun kebijakan pengembangan koleksi, melakukan seleksi bahan pustaka serta melakukan pengadaan bahan pustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Apabila dilihat dari tujuannya pengembangan koleksi adalah untuk membangun

sebuah koleksi perpustakaan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan tetap memperhatikan tuntutan (demand) minat (need) serta selera (taste) dari masyarakat pengguna perpustakaan. Pendapat senada juga dikemukakan Bonita Bryant (1987) yang mengatakan bahwa tujuan pengembangan koleksi adalah untuk menyediakan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna tersebut

setiap jenis koleksi harus dikembangkan sesuai dengan visi dan misi lembanganya serta kebutuhan para penggunanya.

5.1.3 Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Selain koleksi yang menjadi komponen penilaian dalam pelayanan, petugas perpustakaan juga merupakan faktor yang penting dalam pelayanan. Petugas perpustakaan dipersiapkan dengan baik sejak awal, yaitu melalui rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (on the job training) dan di luar jabatan (off the job training). Salah satu tugas petugas perpustakaan desa adalah melayani pengunjung atau pemakai yang datang ke perpustakaan. Sebagai petugas pengelola yang melayani pemakainya tentu saja diharuskan memberikan layanan yang baik dan memuaskan kepada pemakainya. Pemberian layanan yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan, selera, minat, dan keinginan pemakainya (Sutarno, 2004:163).

Menurut Gill (2001: 62) kualitas keterampilan petugas pengelola perpustakaan, antara lain:

1. kemampuan berkomunikasi secara positif dengan pemakainya,
2. Kemampuan untuk mengerti kebutuhan pemakainya,
3. Kemampuan bekerja sama dengan komunitas individu dan kelompok,
4. Pengetahuan dan pemahaman perbedaan kebudayaan,

5. Pengetahuan koleksi perpustakaan dan bagaimana mengaksesnya,
6. Memahami dan memiliki simpati dengan prinsip layanan umum,
7. Kemampuan untuk bekerja dengan staf lainnya dalam memperbaiki layanan perpustakaan yang efektif,
8. Keterampilan organisasi dengan fleksibilitas untuk mengidentifikasi dan perubahan pelaksanaan,
9. Imajinasi, visi, dan keterbukaan pada ide-ide baru dan praktis,
10. Siap untuk mengubah metode bekerja dalam situasi yang baru,
11. Pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.

Keberhasilan suatu Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat diukur berdasarkan pada tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat pelayanan informasi dan rekreasi bagi masyarakat. Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal dan sebagai sarana penunjang pendidikan formal. Sesuai dengan tujuan dan fungsi Perpustakaan Desa/Kelurahan yang cukup

5.1.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perpustakaan merupakan komponen pendukung berjalannya suatu perpustakaan. Dalam ruangan perpustakaan desa harus tersedia perlengkapan untuk menunjang

kegiatan perpustakaan. Perlengkapan perpustakaan tidak terlepas dari Sarana Prasarana yang akan menunjang kenyamanan di dalam ruangan. Perpustakaan seharusnya memiliki ruangan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan yang sesuai dengan rencana perpustakaan atau standar nasional terkait perpustakaan (IFLA, 2001: 42). Ruang perpustakaan desa seyogyanya terletak dalam satu gedung dengan gedung kantor desa dan mudah dicapai. Untuk dapat mewujudkan kelancaran kerja setiap perpustakaan desa diperlukan ruangan yang cukup luas dan memadai.

5.1.5 Pembudayaan Kegemaran Membaca

Kluckhohn dan Kelly (1945), berpendapat bahwa budaya adalah “semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia”. Kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi/akal, sehingga dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Menurut Sutarno yang dikutip oleh oom Nurohma (2014,15) budaya baca ialah suatu “kegiatan yang teratur dan rutin sebagai ciri masyarakat yang membutuhkan informasi. Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah terbiasa

dan berproses dalam waktu yang lama dan didalam hidupnya selalu menggunakan waktunya untuk membaca”.

Sedangkan Menurut Rozin (2008), budaya membaca adalah “kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap segala informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu”.

Pembudayaan kegemaran membaca merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan perpustakaan, dengan demikian sudah seharusnya setiap perpustakaan memikirkan ataupun membuat program terkait upaya-upaya pembudayaan kegemaran membaca secara terencana. Karena tidak semua masyarakat menganggap bahwa membaca itu adalah suatu pekerjaan yang penting oleh karena itu disinilah peran perpustakaan mengubah pemikiran dan paham berikut mengingat sesuai profesinya bahwa secara umum Pustakawanlah yang lebih berpotensi untuk mensosialisasikan betapa bermanfaatnya gemar membaca itu. Dalam Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Bab 13 Pasal 49 : Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca; kemudian pada Pasal 50 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan

bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;

5.2 Kerangka konsep

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 7 ayat 1 (a) menjelaskan tentang peran pemerintah yakni “mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional”

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan desa dilakukan oleh dinas terkait yakni dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur, hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Bupati luwu timur Nomor 48 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait tugas pokok dari dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perpustakaan. Pembinaan yang dimaksud dalam hal ini tertuang dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan perpustakaan daerah bab VIII pasal 26 ayat 2 pembinaan yang dimaksud

meliputi : pengembangan perpustakaan desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan koleksi perpustakaan, pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan sarana dan prasarana dan pembudayaan kegemaran membaca.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten luwu timur dalam pengembangan perpustakaan desa khususnya di kecamatan tomoni. Peneliti akan mengambil 3 sampel sebagai representatif dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni. Adapun desa yang dijadikan sampel yakni desa bangun jaya, desa mulyasri dan desa bangun karya. Kemudian, alasan penulis mengambil ketiga desa tersebut adalah memiliki banyak perbedaan misalnya jumlah staf perpustakaan perpustakaan desa nirwana di desa bangun karya memiliki 2 staf sedangkan perpustakaan desa mulyasri dan desa bangun karya hanya mempunyai 1 staf saja sehingga dapat menghambat jalannya pelayanan perpustakaan desa, disisi lain perpustakaan desa mulyasri melakukan penambahan koleksi setiap tahunnya sedangkan perpustakaan desa bangun jaya terakhir kali melakukan penambahan koleksi pada tahun 2020 dan perpustakaan desa bangun karya sejak didirikan hanya pernah melakukan pengembangan koleksi 1 kali yaitu saat perpustakaan desa didirikan.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perpustakaan desa yakni: pengembangan perpustakaan desa berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, pengembangan koleksi, pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan sarana dan prasarana dan pembudayaan kegemaran membaca serta dalam pelaksanaan pengembangan perpustakaan desa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

Sehingga dalam penelitian akan dikaji mengenai bagaimana Peran dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur dalam pengembangan perpustakaan desa di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian di atas maka dapat disusun suatu kerangka konsep melalui skema berikut ini :

Figure 1. kerangka konsep

